

**SEMENANJUNG KOREA: KENDALA REUNIFIKASI KOREA
SELATAN KEPADA KOREA UTARA**

Raquel Olivia Caroline
jeonlivia13@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Perang Korea yang berlangsung pada 1950–1953 merupakan konflik yang berakar pada perbedaan ideologi dan pengaruh kekuatan besar, di mana Korea Utara didukung Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan berhaluan pro-Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II memicu pembagian paksa Semenanjung Korea, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan sebagai bagian dari dinamika Perang Dingin. Letak strategis Semenanjung Korea serta isu proliferasi nuklir Korea Utara menimbulkan kekhawatiran keamanan di kawasan. Dalam konteks ini, berbagai presiden Korea Selatan telah menerapkan beragam kebijakan luar negeri untuk mendorong proses reunifikasi, yaitu upaya penyatuan kembali dua negara yang terpisah akibat peristiwa sejarah. Studi ini membahas dinamika politik, keamanan, dan kebijakan strategis yang memengaruhi peluang reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara di tengah kompleksitas geopolitik regional.

Kata Kunci: Korea Selatan, Korea Utara, Reunifikasi, Semenanjung Korea.

Abstract: *The Korean War (1950–1953) emerged from ideological divisions and rival great-power influences, with North Korea supported by the Soviet Union and South Korea aligned with the United States and the broader Western bloc. Japan's defeat in World War II triggered the forced division of the Korean Peninsula, which later escalated into a prolonged conflict shaped by the dynamics of the Cold War. The peninsula's strategic geographic position, combined with North Korea's nuclear developments, has contributed to persistent regional security concerns. In this context, successive South Korean presidents have implemented a variety of foreign policy approaches aimed at advancing reunification, defined as the process of restoring unity between two states separated by historical events. This study examines the political, security, and strategic factors that shape the prospects for reunification between South and North Korea amid complex regional geopolitics.*

Keywords: *South Korean, North Korean, Reunification, Korean Peninsula.*

PENDAHULUAN

Peperangan yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara pada 1950-1953 berkaitan dengan perbedaan kubu, dimana Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan atau Republik Korea yang menjadi pro-barat. Terbaginya dua negara tersebut diakibatkan terjadinya peperangan di Semenanjung Korea akibat dampak dari peperangan perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada perang dunia ke II menjadi awal dari pembagian semenanjung Korea dengan pembagian paksa (Haryanto, 2022). Letak geografis yang strategis dari Semenanjung Korea memberikan kekhawatiran mendalam kepada Korea Utara dan wilayah sekitar akan keamanan mereka, dikarenakan munculnya isu nuklir milik Korea. Pada permasalahan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan luar negeri yang telah dilakukan oleh presiden-presiden Korea Selatan dalam usaha reunifikasinya. Dimana reunifikasi merupakan suatu cara untuk mengembalikan dua negara atau menyatukan kembali dua negara yang berpisah dikarenakan oleh peristiwa sejarah, sehingga dua negara tersebut menjadi satu. Yang dimana dalam pembahasan ini berkaitan dengan semenanjung korea yakni Korea Selatan dan Korea Utara (Muhammad, 2018). Selain latar belakang sejarah yang berkaitan dengan Perang Dingin, pentingnya isu reunifikasi bagi Korea Selatan tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga aspek ekonomi dan kemanusiaan, seperti penyatuan keluarga yang terpisah sejak berakhirnya Perang Korea (Kang, 2018). Di samping itu, geopolitik Semenanjung Korea berada di tengah kepentingan strategis Amerika Serikat dan Cina, yang menjadikan stabilitas kawasan sebagai isu sensitif. Amerika Serikat menekankan denuklirisasi sebagai syarat utama dialog, sedangkan Cina cenderung mempertahankan status quo demi stabilitas perbatasannya (Scobell & Harold, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kendala utama Korea Selatan dalam upaya mewujudkan reunifikasi, dengan melihat faktor kebijakan domestik, keamanan, dan dinamika internasional.

METODELOGI

Penerapan Teori Kepentingan Nasional dan Konsep Reunifikasi

Teori kepentingan nasional menurut (Rudy, 2002) adalah bahwa dalam mencapai keamanan serta kesejahteraan negara perlu ditetapkan pentingnya kepentingan nasional untuk dicapai sebagai tujuan setiap negara untuk menjaga stabilitas negaranya sesuai yang dicita-citakan. Teori kepentingan nasional berperan dalam bagaimana Korea Selatan berusaha untuk melindungi dari ancaman nuklir. Sedangkan Korea Utara dalam melakukan praktik uji nuklir yang digunakan sebagai keamanan untuk menjaga negaranya. Perbedaan kebijakan pada kepentingan nasional kedua negara inilah yang mempengaruhi hubungan dua negara tersebut hingga saat ini.

Menurut (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2002) konflik merupakan usaha dalam membangun sebuah hubungan baru dengan melakukan penangangan atas dasar sebab-akibat konflik yang dimana hal ini nanti akan menghasilkan sebuah penyelesaian yang akan bertahan lama dari kelompok maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan yang tidak baik tersebut. Secara hal ini, upaya dalam resolusi konflik yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Banyak melibatkan aktor negara dan non negara, seperti Amerika Serikat dan Rusia dan juga PBB dalam menjaga keamanan internasional dengan mencapai kesepakatan bersama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan buku akademik, jurnal, laporan kebijakan, dan publikasi lembaga internasional (Creswell, 2014). Teori kepentingan nasional digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana Korea Selatan dan Korea Utara merumuskan tujuan strategisnya masing-masing, terutama terkait isu nuklir. Selain itu, konsep konflik dan resolusi konflik dari Ramsbotham, Miall, & Woodhouse (2011) digunakan untuk menganalisis mengapa dialog dan upaya rekonsiliasi sering mengalami kebuntuan meskipun telah berlangsung selama beberapa dekade. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor politik dan struktural yang menghambat reunifikasi.

PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Luar Negeri Masa Lalu Korea Selatan Menghadapi Korea Utara

Pada tahun 1948-1987, Politik luar negeri Korea Selatan masih dibawah masapemerintahan otoriter, yang dimana hal ini disebabkan oleh keadaan Republik Korea yang belum stabil sehingga mengakibatkan kondisi ketertiban negara dipimpin oleh para kalangan militer. Pada pemerintahan Sygman Rhee ini, kebijakan luar negeri Korea Selatan masih berada dalam fase upaya pertahanan dari ancaman invansi Korea Utara serta bertahan atas goncangan politik dalam negeri dalam sistem dan fungsinya (Puimara, 2018).

Pada 1992-1997 dimasa pemerintahan Kim Young Sam Pertahanan terhadap ancaman Korea Utara masih ditegakkan karena pada saat itu, prioritas utama Korea Selatan adalah untuk mempertahankan keamanan kawasan. Perbedaan antara masa pemerintahan Sygman Rhee dengan Kim Young Sam adalah Kontrol militernya dipegang oleh sipil dan bukannya oleh kalangan militer. Sehingga dalam melakukan keamanan negaranya. Presiden Kim Young Sam melakukan keamanan secara lebih persuasif dengan hasil dari penerapan tersebut menimbulkan hubungan yang baik antara Korea Selatan dan Korea Utara atas keberhasilan reformasi politiknya dengan juga melakukan kebijakan yang bersifat lebih fleksibel dengan tujuan pada saat itu ingin menciptakan Clean Government atau dengan kata lain pemerintah yang bersih. Tetapi dalam penerapan yang dilakukannya ini ternyata hampir berdampak kepada hubungannya dengan Lprea Utara. Karena pada tahun 1989 terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh National Security kepada Li In Mo yang merupakan komunis profesional, karena pembelotan ke Korea Utara (Puimara 2018).

Pada tahun 1998-2003, pada masa pemerintahan mantan presiden Kim Dae Jung. Kim Dae Jung melakukan pendekatan secara persuasif dalam cara menangani Korea Utara dan menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif daripada kepemimpinan sebelumnya yang dalam kebijakannya terkesan cukup kaku (Puimara, 2008). Akhirnya kebijakan Kim Dae Jung tersebut dinamai dengan Sunshine Policy yang dimana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Korea Utara dengan cara kunjungan antara dua negara yang dilakukan secara bertukar-tukar, sehingga dari hal ini. Menurut Kim Dae Jung Korea Utara akan dapat meningkatkan kepercayaannya atas niat tulus Korea Selatan dalam niat kunjungan tersebut. Ada 4 pertemuan yang dilakukan oleh dua negara semenanjung Korea ini, yakni:

- 1) Dimana pada 29 agustus-1 september 2000 di Seoul merupakan pertemuan pertama yang membahas terkait dengan jalur penyambungan kereta api Seoul-Sinuiju, Korea Utara.
- 2) Pada tanggal dan bulan yang sama, pertemuan kedua negara ini, membahas terkait kesepakatan atas diadakannya pertemuan yang membicarakan Confidence Building Measure yang hanya diikuti oleh para pejabat militer dan membahas terkait program pertukaran dan kerjasama ekonomi.
- 3) Persetujuan dalam pembentukan komite dalam upaya untuk melakukan kerjasama atas proyek-proyek ekonomi yang ini diimplemtasikan, yang dimana pertemuan ini diadakan di pulau Cheju, Korea Selatan pada 27-30 september 2000 sebagai pertemuan ketiga.
- 4) Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh semenanjung Korea ini, dilakukan di Korea Utara pada 12-15 desember 2000. Dengan hasil dari pertemuan tersebut 2 negara Korea tersebut menandatangani P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan juga menandatangani IGA atau Perlindungan Investasi, serta pada pertemuan tersebut Korea Selatan bersedia melakukan suplai energi Listrik kepada Korea Utara sebesar 5 ratus ribu KVA.

Pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun (2003–2008), Korea Selatan melanjutkan kebijakan engagement yang sebelumnya dikembangkan Kim Dae Jung. Roh menerapkan “Peace and Prosperity Policy,” yang bertujuan memperkuat stabilitas jangka panjang melalui dialog dan kerjasama ekonomi lintas batas (Moon, 2012). Salah satu pencapaian utama periode ini adalah pengoperasian Kaesong Industrial Complex (KIC) pada 2004, yang menjadi simbol integrasi ekonomi antar-Korea meskipun

kemudian beberapa kali terhenti akibat ketegangan politik (Chung, 2009). Upaya engagement ini tetap menghadapi hambatan besar dari program nuklir Korea Utara dan tekanan dari Amerika Serikat yang menekankan kebijakan sanksi global.

Upaya Reunifikasi Beserta Kendala Yang Dihadapi Korea Selatan

Masalah Nuklir Korea Utara

Pada saat pemecahan semenanjung Korea pada perang dunia ke II membuat negara Korea Selatan dan Negara Korea Utara menjadi dua negara yang berbeda. Karena masalah inilah pada saat terjadinya isu nuklir yang dimulai dari ancaman Amerika Serikat kepada Korea Utara dalam penyelesaian semenanjung Korea dengan menggunakan nuklir, memberikan kewaspadaan mendalam kepada Korea Utara atas keamanan negaranya tersebut. Sehingga pada akhirnya atas bantuan oleh Uni Soviet, Korea Utara dapat mengembangkan berbagai macam nuklir yang samapai saat ini perkembangan nuklir tersebut memberikan banyak ketakutan bagi berbagai negara, terutama Korea Selatan. (Fishcer, 1997).

Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan

1. Trust Politic (2013-2017)

Kebijakan Trustpolitik merupakan kebijakan milik mantan presiden Park Geun-Hye dimana tujuan dari kebijakan trust politik adalah untuk melakukan denuklirisasi dengan membangun sebuah kepercayaan dengan cara melakukan kolaborasi promosi kerjasama secara institusional agar mempererat hubungan antar kawasan atas konflik yang cukup tinggi pada semenanjung Korea pada saat itu (Ku, 2019). Dalam penerapannya sendiri presiden Park Geun Hye memberikan beberapa kebijakan didalamnya, yakni:

a. Penerapan Trust Building Process

Trust Building Process merupakan proses Korea Selatan dalam membantu Korea Utara untuk meninggalkan praktik nuklirnya dengan upaya supaya Korea Utara semakin maju, Karena Trust Building Process memiliki prinsip atas tidak adanya ketakutan atas ancaman nuklir. Tetapi, pada penerapan kebijakan ini. Korea Utara mengkritik keras Korea Selatan karena menurut Korea Utara, hal ini hanya menguntungkan Korea Selatan dan hanya akan mendatangkan keruntuhan dari Korea Utara. Atas hal itu, pada akhirnya, Park Geun Hye berakhir untuk memutuskan niat upaya damai dan niat kerjasama dengan Korea Utara. Yang berakhir pada tingkat agresif Korea Utara semakin meningkat akibat tidak inginnya Park Geun Hye dalam menjalin kembali hubungan dengan Korea Utara (Monday & Rosyida, 2021) (Lestari et al, 2021)

b. Penutupan atas Kaesong Industrial Complex (KIC)

Kawasan Industri Kaesong merupakan kawasan Industri diseberang zona demiliterisasi Korea Selatan atau lebih tepatnya berada di Korea Utara. Kawasan ini sendiri merupakan simbol atas kerjasama antar-korea yang dibangun pada 2003. Dengan tujuan KIC ini adalah sebagai tempat untuk mengembangkan industri Korea Selatan dengan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Korea Utara sebagai bantuan atas ketidakstabilan perekonomian Korea Utara. Tetapi, meskipun KIC ini merupakan bukti kerjasama antar-korea. KIC dengan cepat telah menjadi simbol kerjasama dan simbol hubungan kuat antar dua Korea . Meskipun KIC telah menjadi simbol perdamaian antar dua Korea, KIC pernah ditutup secara sepihak sebanyak 2 kali penutupan. Pada penutupan pertama KIC, dilakukan dengan alasan ketidaksukaannya Korea Utara atas kebijakan keras dari presiden Lee Myun Bak. Lalu penutupan kedua ini, dilakukan pada 2016, dengan alasan praktik nuklir dan respon agresif dari Korea Utara ke Korea Selatan. Sehingga hal ini akhirnya membuat hubungan antar-korea kembali memburuk (Yun, 2013); (Hu, 2016) (Choe, 2016).

c. Penutusan serta Pengurangan atas Bantuan Kemanusiaan.

Pada masa pemerintahan presiden Park Geun Hye diketahui jumlah bantuan dana kesehatan kemanusiaan memiliki persentase yang sangat rendah yang dimana dana yang diberikan kepada Korea Utara hanya sebanyak 5,1 miliar won (\$5 juta) yang dimana ini tidak sesuai dengan apa yang

disetujui pada 2007 dan tidak sebanding dengan pada masa pemerintahan presiden Roh Moo Hyun yang mencaoai 90,9 miliar won (\$89,3 juta). Sehingga hal ini mengakibatkan, hubungan antar-korea mengalami keburukan kembali (Lestari et al, 2021); (Wiyawa, 2012).

Atas banyaknya kegagalan pada penerapan kebijakan konservatif yang dibuatnya membuat pandangan Park Geun Hye kepada korea Utara menjadi menganggap bahwa Korea Utara itu merupakan negara yang licik, tidak kooperatif, licik, serta banyak tipu muslihat.

2. New Sunshine Policy (2018)

New Sunshine Policy sendiri merupakan kebijakan milik mantan presiden Moon Jae In melakukan pendekatan kepada Korea Utara secara soft way sebagai cara untuk melakukan reunifikasi dengan cara bekerjasama dalam menciptakan perdamaian (Rosykhiani, 2018). New Sunshine Policy sendiri juga merupakan gerakan kebijakan baru daripada Sunshine Policy milik Kim Dae Jung, dalam kebijakan New Sunshine Policy ini Korea Selatan akan bersikap lebih netral dalam upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dan masalah antar semenanjung Korea. Yang dimana berarti Korea Selatan harus bisa untuk tidak terlalu condong kepada Amerika Serikat agar menjaga hubungan baik dengan Korea Utara. Sehingga dari penerapan ini memberikan dampak yang positif daripada Korea Utara dan cukup memberikan dampak yang signifikan dalam hubungan antar-korea. Tetapi dari kebijakan ini, tidak cukup untuk membuat keberhasilan kepada keinginan denuklirisasi karena, denuklirisasi haruslah terjadi jika adanya terjalin hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang memiliki hubungan tidak baik (Panda, 2020).

3. Kebijakan Yoon Seok Yeol

Presiden Yoon Seok Yeol merupakan presiden Korea Selatan yang baru, pada kebijakan yang dibuat oleh Yoon Seok Yeol kebijakan Korea Selatan kembali kepada kebijakan konservatif dimana dalam kebijakannya. Presiden Yoon Seok Yeol tidak akan melakukan deklarasi atas berakhirnya perang antar semenanjung Korea, sebelum Korea Utara melakukan denuklirisasi atas nuklir mereka dan presiden Yoon Seok Yeol juga mengatakan akan membalas provokasi Korea Utara dengan lebih tegas, dengan menggunakan kekuatan aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat. Sehingga dari kebijakan baru inilah, membuat Korea Utara bertingkah semakin agresif dalam provokasi dan tidak dilakukannya denuklirisasi tersebut (Csis.org, 2023); (Novitasari, 2022); (kurniawan, 2023).

Faktor Internal Kedua Negara

a. Faktor Ekonomi

Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara menjadi hambatan besar. Korea Selatan merupakan negara berpenghasilan tinggi, sedangkan Korea Utara mengalami stagnasi ekonomi jangka panjang. Bank of Korea memperkirakan bahwa biaya reunifikasi dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan dolar tergantung skenario integrasi politik dan ekonomi (Bank of Korea, 2015). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran domestik bahwa reunifikasi dapat menjadi beban fiskal besar bagi Korea Selatan.

b. Faktor Sosial dan Perubahan Persepsi Publik

Persepsi masyarakat Korea Selatan, khususnya generasi muda, menunjukkan penurunan dukungan terhadap reunifikasi. Survei Korean Institute for National Unification (KINU) menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda memandang reunifikasi sebagai beban ekonomi. berbeda dengan generasi lama yang melihatnya sebagai tugas nasional (KINU, 2021). Perubahan persepsi ini mempengaruhi arah formulasi kebijakan reunifikasi.

c. Faktor Politik Domestik Korea Selatan.

Kebijakan terhadap Korea Utara sangat dipengaruhi oleh orientasi politik presiden yang berkuasa. Pemerintahan progresif (Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, Moon Jae In) cenderung mengedepankan dialog dan engagement, sedangkan pemerintahan konservatif (Lee Myung Bak, Park Geun Hye, Yoon Suk Yeol) menekankan tekanan dan denuklirisasi sebagai syarat utama (Cha, 2016). Ketidakkonsistenan kebijakan ini menciptakan ambiguitas dan ketidakpercayaan bagi Korea

Utara.

d. Ketidakpercayaan dan Faktor Keamanan

Ketidakpercayaan mendalam (deep-rooted mistrust) antara kedua negara merupakan hambatan utama. Korea Utara menganggap Korea Selatan sebagai representasi kepentingan Amerika Serikat, sementara Korea Selatan menganggap Korea Utara tidak dapat diprediksi karena program nuklir dan provokasi militernya (Snyder, 2018). Ketidakpercayaan ini membuat proses diplomasi mudah terhenti meskipun dialog formal sedang berlangsung.

Kegagalan Reunifikasi antar Semenanjung Korea

Keinginan untuk mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea telah menghadapi berbagai hambatan dalam proses implementasinya. Beragam upaya yang dilakukan sering kali berakhir tanpa hasil karena adanya faktor-faktor kompleks yang sulit ditemukan solusinya. Salah satunya adalah kegagalan mencapai kesepakatan denuklirisasi, yang dipengaruhi oleh perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan Korea Utara terkait isi serta mekanisme kerja sama yang diusulkan. Ketidaksepakatan ini turut dipengaruhi oleh dinamika sejarah dan saling ketidakpercayaan yang masih kuat antara kedua negara, sehingga berdampak pada memburuknya hubungan antar-Korea. Selain itu, situasi domestik di Korea Utara juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam proses reunifikasi. Tindakan pemerintah dalam menjaga stabilitas internal, termasuk respons terhadap tindakan warga yang dianggap bertentangan dengan ketentuan negara, menciptakan dinamika yang kompleks bagi upaya reunifikasi. Kondisi ini membuat arah kebijakan reunifikasi di bawah kepemimpinan Kim Jong Un terlihat belum sepenuhnya jelas atau konsisten. (Mahalika, 2020); (Yoga et al, 2019).

KESIMPULAN

Upaya reunifikasi di Semenanjung Korea hingga saat ini masih menghadapi hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Perbedaan kepentingan nasional antara Korea Selatan dan Korea Utara, terutama terkait isu nuklir dan keamanan, menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya penyatuan kedua negara. Meskipun berbagai pemerintahan Korea Selatan telah menerapkan pendekatan yang berbedamulai dari kebijakan persuasif hingga kebijakan konservatif semuanya belum mampu menghasilkan perubahan mendasar terhadap sikap Korea Utara. Selain itu, dinamika geopolitik kawasan, khususnya peran negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina, menciptakan situasi yang membuat proses negosiasi tidak sepenuhnya berada dalam kendali kedua Korea. Perubahan politik domestik di Korea Selatan, perbedaan ideologi, serta ketidakpercayaan mendalam antara kedua negara turut memperburuk konsistensi kebijakan yang dibutuhkan agar proses perdamaian dapat berjalan berkelanjutan. Perbedaan ekonomi yang sangat timpang dan semakin berkurangnya dukungan publik di Korea Selatan juga menambah kompleksitas menuju reunifikasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, proses reunifikasi masih berada pada tahap yang jauh dari realisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan besar dalam dinamika politik internal Korea Utara, stabilitas kawasan, serta terciptanya fondasi kepercayaan yang kuat antara kedua negara. Untuk saat ini, masa depan reunifikasi tetap tidak pasti dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan keamanan dan politik di Semenanjung Korea.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank of Korea. (2015). *Economic Impact of Korean Reunification*. Seoul: BOK
- Cha, V. (2016). *The Impossible State: North Korea, Past and Future*. New York: HarperCollins.
- Chung, J. H. (2009). "Between Ally and Partner: Korea-China Relations and the United States." *Asian Survey*, 49(3).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE.
- Fischer, D. (1997). *History of the International Atomic Energy Agency : he First Forty Years*. Austria:IAEA. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/018/29018219.

- pdf Haryanto, A. (2022, Oktober 19). Apa Akar Konflik Korut-Korsel: Bagaimana Penyebab & Sejarahnya?. Tirtoid. <https://tirtoid.id/apa-akar-konflik-korut-korsel-bagaimana-penyebab-sejarahnya-gxtK>
- Kang, D. C. (2018). *American Grand Strategy and East Asian Security*. Stanford University Press.
- KINU – Korean Institute for National Unification. (2021). *Unification Perception Survey Report*. Seoul: KINU.
- Kurniawan, D. (2023, September 26). Beraliansi dengan Amerika Serikat, Yoon Suk-yeol Ancam Akhiri Rezim Korea Utara Jika Gunakan Senjata Nuklir!. Jawapos.com. <https://www.jawapos.com/internasional/013020511/beraliansi-dengan-amerika-serikat-yoon-suk-yeol-ancam-akhiri-rezim-korea-utara-jika-gunakan-senjata-nuklir>
- Ku, Y. (2019). Privatized Foreign Policy? Explaining The Park Geun Hye Administration Decision Making Process. *Korea Journal*, 59(1), 106-134. <https://doi.org/10.25024/kj.2019.59.1.106>
- Lestari, B. U. S., Karjaya., L Putrawandi., & Sood. M. (2021). Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 81-109.
- Mahalika, F. (2020, Agustus 6). *Dinamika Reunifikasi Semenanjung Korea*. pskp.or.id. <https://www.pskp.or.id/2020/08/06/dinamika-reunifikasi-semenanjung-korea/>
- Monday, P. I., Rosyida, H. N. (2022). Motif Moon Jae In Dalam Merekonsiliasi Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara Melalui Korea Peninsula Peace Initiative. *Al-ulum ilmu Sosial dan humaniora*. 8(2).
- Moon, C. (2012). “The Sunshine Policy: Its Impact and Legacy.” *Korea Observer*, 43(1).
- Muhammad, S. V. (2018). Isu Keamanan Di Semenanjung Korea Dan Upaya Damai Parlemen. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. 7(1). <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v7i1.1120>
- Novitasari, S. (2022, April 16). Menyoroti Kebijakan Presiden Terpilih Korea Selatan, Yoon Seok Yeol, dan Alasan Dirinya Dijuluki Trump dari Negara Ginseng. *lpmopini.online*. <https://lpmopini.online/menyoroti-kebijakan-presiden-terpilih-korea-selatan-yoon-seok-yeol-dan-alasan-dirinya-dijuluki-trump-dari-negara-ginseng/>
- Panda, J. P. (Ed.). (2020). *The Korean Peninsula and Indo-Pacific power politics: status security* London: Routledge. books.google.co.id
- Puimara, L. P. (2006). *Kebijakan Korea Selatan Terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea*. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118814-T%2025108-Kebijakan%20Korea-HA.pdf>
- Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press. books.google.co.id
- Rosykhiani, A. S. (2018). *The Background Of South Korea Reorientation To Sunshine Policy Under Moon Jae In Administration*. Thesis SKR FISIP 142. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20061?show=full>
- Rudy, T. M. (2022). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=2021508>
- Scobell, A., & Harold, S. (2013). *China’s Strategy Toward Korea*. RAND Corporation.
- Snyder, S. (2018). *South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers*. Columbia University Press.
- Wijaya, A. (2012, December 20). Park Geun Hye Utamakan Keamanan Nasional dan Korut (H. Barus (Ed.)). *Investor.Id*. <https://investor.id/archive/park-geun-hye-utamakan-keamanan-nasional-dan-korut>
- Yoga, G. V., Nanda, B. J., & Trisni, S. (2019). Respon Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump Terhadap Program Nuklir Korea Utara. *Journal of Diplomacy and*

- International Studies. 3(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/6280/2990>
- Yoon Suk Yeol: What to Expect from South Korea's Next President. (2022, Maret 9). csis.org.. <https://www.csis.org/analysis/yoon-suk-yeol-what-expect-south-koreas-next-president>
- Yun, B. (2013). Park Geun-hye's Trustpolitik: A New Framework for South Korea's Foreign Foreign Policy. *Global Asia*, 8(3), 8–15. https://globalasia.org/v8no3/cover/park-geun-hyes-trustpolitik-a-new-framework-for-south-koreas-foreign-policy_yun-byung-se